

# **POTENSI EKONOMI DAN PELUANG PASAR ATAS KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DI DESA KRAKITAN KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024**

## ***THE ECONOMIC POTENTIAL AND MARKET OPPORTUNITIES OF AGRARIAN REFORM POLICIES IN KRAKITAN VILLAGE, BAYAT DISTRICT, KLATEN REGENCY IN 2024***

**Sudibyanung, Dani Iswahyuni, Priyo Katon Prasetyo**

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta

Korespondensi: sudibyanung@stpn.ac.id

### **ABSTRAK**

Penataan akses sebagai tindak lanjut dari program penataan aset di Desa Krakitan pada dasarnya ditujukan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk diteliti peluang usaha yang ada dari sisi produktivitas maupun pasarnya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis biaya produksi dan peluang pasar. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga jenis usaha masyarakat yang dominan di Desa Krakitan, yaitu: usaha pertanian jagung, peternakan sapi, serta produksi pupuk organik. Dari hasil analisis produktivitas menunjukkan bahwa usaha pertanian jagung mempunyai prospek yang cukup baik, namun dari sisi peluang pasar menunjukkan telah terjadi excess supply. Untuk jenis usaha peternakan sapi, hasil analisis menunjukkan produktivitas yang relatif kecil, yaitu hanya menghasilkan keuntungan sebesar Rp1.182.500,-/ekor atau masih di bawah besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang berlaku tahun 2024 yang besarnya mencapai Rp2.244.012/bulan. Dari sisi peluang pasar pun usaha ini juga kurang mempunyai prospek yang baik karena jumlah permintaan sapi per tahun di Kabupaten Klaten rata-rata hanya sekitar 18.347 ekor, sedangkan ketersediaan sapi diestimasi sekitar 93.000 ekor, atau telah terjadi excess supply. Berbeda halnya dengan jenis usaha pupuk organik. Hasil analisis menunjukkan bahwa produktivitas usaha atau keuntungan mencapai besaran Rp8.852.800,- /bulan atau jauh di atas besaran UMK. Selain itu, peluang pasar juga sangat terbuka, di mana hal tersebut ditunjukkan dari kebutuhan pupuk per tahun di Kabupaten Klaten adalah sebesar 47.562 ton, sedangkan pupuk yang tersedia dari mekanisme subsidi pemerintah hanya sebesar 37.474 ton. Dengan kata lain, kebutuhan pupuk masih kurang sebesar 10.088 ton, atau secara ekonomi telah terjadi excess demand.

**Kata kunci :** kesejahteraan masyarakat, produktivitas usaha, peluang pasar

### **ABSTRACT**

*As a follow-up to the asset structuring program in Krakitan Village, access structuring program is essential to achieve community welfare. Therefore, it is important to study existing business opportunities in terms of productivity and market potential. This research uses a descriptive quantitative approach, employing production cost analysis and market opportunity methods. The findings reveal that there are three dominant types of community businesses in Krakitan Village: corn farming, cattle farming, and organic fertilizer production. The productivity analysis shows that corn farming has promising prospects; however, market opportunities indicate an excess supply. For cattle farming, the analysis reveals relatively low productivity, with a profit of only IDR 1,182,500 per head, which is below the 2024 regional minimum wage (UMK) of IDR 2,244,012 per month. Market opportunities for cattle farming also appear unfavorable, with an annual demand for cattle in Klaten Regency*

averages at around 18,347 heads, while the supply stands at approximately 93,000 heads, indicating an excess supply. Conversely, organic fertilizer production has different results. The analysis shows that the business productivity or profit reaches IDR 8,852,800 per month, significantly exceeding the regional minimum wage. Furthermore, market opportunities are highly favorable, with an annual demand for 47,562 tons of fertilizer in Klaten Regency, whereas the supply through government subsidy mechanisms is only 37,474 tons. This indicates that there is a shortage of 10,088 tons, representing an economic excess demand.

**Keywords :** community welfare, business productivity, market opportunities

## I. PENDAHULUAN

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria terdiri atas substansi mengenai kegiatan *asset reform* (penataan aset) dan *access reform* (penataan akses). Penataan aset lebih mengarah pada kegiatan redistribusi tanah dan legalisasi aset, sedangkan untuk penataan akses merupakan tindak lanjut dari *asset reform* yang berfokus pada bagaimana cara membuka akses bagi masyarakat di dalam mengoptimalkan sumber daya tanah melalui partisipasi ekonomi politik, modal, pasar, teknologi, bahkan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan subjek reforma agraria untuk mencapai kesejahteraan. Peningkatan kapasitas produk yang paling relevan dengan perkembangan usaha bagi masyarakat secara umum saat ini adalah industri kreatif. Bahkan, Sudaryono (2017) memproyeksikan ke depan industri kreatif akan menjadi sektor ekonomi dominan setelah perbankan dan industri pengolahan. Wujud riil dari usaha industri kreatif saat ini yang paling banyak dikembangkan adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Secara makro, kebijakan untuk mewujudkan *output* sesuai dengan luaran rencana strategis kementerian, penataan akses dilaksanakan melalui 3 (tiga) fase yang terdiri dari: a) kegiatan pemetaan sosial, b) kegiatan penataan kelembagaan, dan c) kegiatan fasilitasi akses dan pendampingan usaha. Ketiga fase ini dilakukan berbasis pada pemanfaatan tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat. Kegiatan pada fase 2 dan 3 dilakukan berupa pendampingan dan dukungan yang diberikan berupa pendampingan dari sektor pertanian, perdagangan, ataupun UMKM, yaitu dengan memberikan akses permodalan, pelatihan, dan dukungan lain sebagaimana sesuai dengan Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria. Menurut Kuncoro (2013) peranan wilayah sub-nasional, yaitu apakah kabupaten dan

kota dalam memengaruhi lokasi aktivitas ekonomi agaknya menjadi makin penting dewasa ini.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa aspek penataan akses sering kali kurang dioptimalkan, terutama dalam mendukung penerima manfaat untuk mengembangkan peluang usaha di bidang pertanian dan peternakan secara berkelanjutan. Kurang terealisasinya *output* keluaran penataan akses ditengarai karena kurangnya peran atau faktor lain yang tidak diperhatikan atau dipertimbangkan saat penyusunan rencana program kegiatan *access reform*. Penelitian Gafuruningtyas et al., (2024) menyebutkan pelaksanaan reforma agraria di Kelurahan Foramadiah, Ternate, belum memberi dampak ekonomi yang cukup signifikan karena kurangnya pendampingan dalam upaya peningkatan nilai tambah produk pertanian. Berbeda halnya dengan hasil penelitian Supinah (2022), yang menyebutkan bahwa dalam kebijakan penataan akses sangat tergantung pada rencana aksi yang dilakukan. Dalam arti jika rencana aksi tersebut memperoleh dukungan dari masyarakat pelaku usaha, *stakeholder*, maupun lingkungan sekitar, maka akan makin besar keberhasilan penataan akses tersebut, yang akhirnya tentu saja peningkatan pendapatan.

Salah satu peluang usaha yang dapat mendukung peningkatan pendapatan masyarakat dalam reforma agraria adalah pengembangan usaha berbasis produksi ternak dan pertanian yang memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal. Dalam konteks pertanian, komoditas jagung sering menjadi tanaman utama dengan hasil produksi yang tinggi, terutama di wilayah pedesaan. Jagung menghasilkan banyak limbah, seperti tongkol dan kulitnya, yang sering kali kurang dimanfaatkan dan hanya menjadi sumber polusi lingkungan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa limbah jagung dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi, seperti pakan ternak dan pupuk organik (Erni et al., 2014) Hingga saat ini, kajian yang membahas

pemanfaatan limbah jagung dalam konteks penataan akses reforma agraria sebagai peluang usaha yang mampu meningkatkan pendapatan petani masih sangat terbatas, mengingat sektor komoditas jagung merupakan salah satu sektor unggulan di pertanian.

Faktor-faktor di luar objek dan subjek reforma agraria dalam penanganan akses reform, seperti kondisi wilayah, baik yang berupa fisik (geografis) maupun non-fisik perlu mendapat perhatian (Sudibyanung et al., 2023). Faktor-faktor ini perlu digali lebih dalam agar penanganan kegiatan penataan akses dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran guna mencapai sasaran yang diharapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Klaten 2021 telah menyelesaikan kegiatan penanganan akses reforma agraria yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Nomor 49/SK-33.NT.02.02/V/2021, di mana salah satu Desa Krakitan menjadi salah satu lokasi dalam kegiatan tersebut. Kegiatan penataan akses merupakan lanjutan dari program sebelumnya berupa penataan aset melalui program PTSL. Pemetaan sosial pada fase pertama kegiatan penataan akses menunjukkan bahwa terdapat target 90 (sembilan puluh) kepala keluarga yang menjadi subjek dan objek reforma agraria. Program Penataan Akses yang dilakukan mencakup kegiatan pelatihan, pendampingan, serta membuka akses pasar untuk produk yang ditawarkan. Kondisi geografis Desa Krakitan memiliki topografi cukup bervariatif, mulai dari daerah yang datar, landai, hingga sedikit curam. Wilayah dengan topografi datar ditemui di sekitar Rawa Jombor hingga yang sedikit curam di sekitar Kawasan Perbukitan Sidoguro. Dengan kondisi fisik geografis yang bervariatif tersebut,

dimungkinkan potensi ekonomi terkait dengan usaha masyarakatnya pun berbeda-beda, sehingga dibutuhkan pendekatan dan strategi yang berbeda pula. Oleh sebab itu, dengan telah dicanangkannya program penataan akses di Desa Krakitan tersebut, maka seyogianya perlu dicermati terlebih dahulu potensi ekonomi apa yang tepat dan sesuai dalam rangka usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga sejalan dengan prinsip usaha produksi yang disampaikan oleh Djohanputro (2008), perlu diperhatikan beberapa pertanyaan pokok yang harus dipertimbangkan dari awal perencanaan kegiatan, yaitu: produk apa dan berapa jumlahnya, bagaimana cara memproduksinya, serta untuk siapa (konsumen) produk tersebut.

Terkait dengan uraian tersebut, maka perlu dan penting untuk diteliti bagaimana prospek dan peluang ekonomi antara program yang telah dicanangkan pada penataan akses dengan potensi-potensi ekonomi yang ada di Desa Krakitan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat judul penelitian Potensi Ekonomi dan Peluang Pasar atas Kebijakan Reforma Agraria di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Tahun 2024.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan kombinasi metode antara *desk study* dengan *field study*. Hal ini dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan mengukur produktivitas usaha maupun peluang pasar dalam rangka pengembangan ekonomi yang berbasis pada kewirausahaan di lokasi penelitian. Terkait dengan cakupan lokasi penelitian, maka di dalam penelitian ini menggunakan unit analisis berbasis desa, yaitu di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Jenis data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder pada Tabel 1.

**Tabel 1** Nama, Jenis, Teknik Pengumpulan dan Sumber Data

No	Nama & Jenis Data	Teknik Pengumpulan	Sumber Data
1	Pelaksanaan <i>access reform</i> (primer)	Wawancara	Pejabat di Kantah Kabupaten Klaten
2	Pendapatan berbagai jenis usaha (primer)	Wawancara	Pelaku ekonomi
3	Bisnis proses usaha (primer)	Wawancara	Pelaku ekonomi
4	Data fisik wilayah berupa peta-peta terkait/peta tematik (sekunder)	Dokumentasi	Kantah Kabupaten Klaten dan instansi terkait lainnya jika diperlukan
5	Data terkait kependudukan	Dokumentasi	Monografi desa dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten

Sumber: Olah Data, 2024

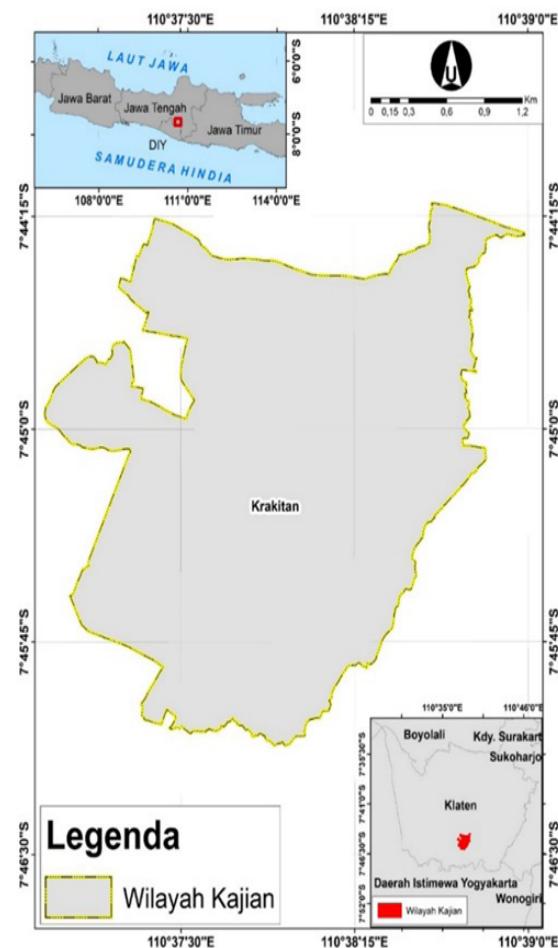
Analisis data dilakukan menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yaitu menggunakan analisis ekonomi untuk melihat potensinya. Secara garis besar, analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dua jenis analisis, yaitu analisis produktivitas usaha dan peluang pasar. Analisis produktivitas dalam hal ini lebih ditekankan pada analisis pengukuran besarnya modal usaha atau input dari setiap satuan produk yang harus dikeluarkan dalam bentuk atau satuan rupiah, dibandingkan dengan besarnya *output* atau satuan besaran nilai jual dari setiap satu satuan *output* produksi. Sederhananya, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen untuk menghasilkan setiap satu produk dibandingkan dengan berapa nilai jual produk yang dapat diperoleh oleh produsen tersebut. Jika nilai jual lebih tinggi daripada nilai produksi, maka dikatakan hal tersebut menguntungkan bagi produsen, demikian pula sebaliknya. Untuk analisis pasar lebih diarahkan pada siapa saja produsen yang menghasilkan produk serupa, berapa banyak jumlah produsen atau kompetitor produk tersebut, dan berapa banyak kebutuhan dari konsumen terhadap produk tersebut. Jika jumlah kompetitor atau pesaing makin sedikit dan kebutuhan konsumen ternyata lebih banyak atau lebih tinggi dari jumlah barang yang mampu diproduksi, maka peluang pasar akan menjadi makin besar, demikian pula sebaliknya. Husnan & Muhammad (2020) menjelaskan bahwa makin sedikit jumlah perusahaan pesaing yang menghasilkan produk sejenis, maka persaingan memperoleh konsumen akan makin besar, sedangkan makin banyak jumlah perusahaan pesaing yang menghasilkan produk sejenis, maka persaingan memperoleh konsumen akan makin kecil. Tentu saja, pada akhirnya hal ini akan menentukan besarnya tingkat pendapatan dari usaha.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Access Reform di Desa Krakitan

Desa Krakitan terletak di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, dengan jarak menuju ke pusat kota Klaten sejauh 7 (tujuh) kilometer. Desa Krakitan merupakan desa dengan area terluas di Kecamatan Bayat seluas 799 ha. Berdasarkan data monografi, Desa Krakitan terdiri dari 32 dukuh, 22 RW, dan 88

RT. Dengan jumlah penduduk 10.088 jiwa, terbagi menjadi 5.086 laki-laki dan 5.002 perempuan. Kepadatan penduduk 126,242 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara administratif, Desa Krakitan berbatasan dengan Desa Karangpaket di sebelah utara, Desa Jimbung di sebelah timur, Desa Wiro dan Desa Jotongan di sebelah selatan, serta Desa Paseban di sebelah barat (Gambar 1).



Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2024

**Gambar 1** Lokasi Penelitian

Desa Krakitan merupakan bagian wilayah Kecamatan Bayat, Klaten. Bentuk lahan di Desa Krakitan merupakan fluvial, termasuk pada cekungan yang berada di dataran rendah dengan topografi yang beragam berupa area datar dan berbukit. Desa Krakitan merupakan wilayah dengan lereng yang beragam dari datar (0-2%), landai (2-8%), dan agak terjal (8-15%). Kemiringan lereng yang bervariasi dapat ditemui di Bukit Sidoguro dan Bukit Patrum yang dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai tempat wisata. Sedangkan pada wilayah datar dan landai, sebagian besar merupakan lahan yang

dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan sawah, lahan kering, lahan permukiman, perkebunan, hutan, industri, dan perdagangan. Lahan sawah di Desa Krakitan mencapai 199,96 ha, sedangkan lahan bukan sawah mencakup 136,56 ha, lahan ini biasa digunakan untuk perkebunan dan lahan kering (BPS Klaten, 2020).

Kelompok usia yang ada di masyarakat, sangat penting untuk melihat potensi penduduk atau sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut, khususnya dari perspektif produktivitas. Makin besar kelompok usia produktif, maka diharapkan makin besar pula produksi yang mampu dihasilkan. Berdasarkan data yang diperoleh, komposisi penduduk menurut kelompok usia di Desa Krakitan dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2** Penduduk Desa Krakitan menurut Kelompok Usia

No.	Kelompok Usia (tahun)	Jumlah (jiwa)	Percentase (%)
1	0 - 14	1.864	21,19
2	15-65	5.825	66,24
3	> 65	1.106	12,57

Sumber: BPS Klaten, 2020

Berdasarkan data demografi penduduk di Desa Krakitan, menunjukkan bahwa lebih dari 50% dari total jumlah penduduk Desa Krakitan, atau lebih tepatnya 66,24% adalah berusia produktif atau usia kerja, sedangkan sisanya, yaitu sebesar 21,19% penduduk Desa Krakitan belum produktif dan sebesar 12,52% penduduk sudah tidak produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari perspektif usia, penduduk Desa Krakitan mempunyai potensi cukup besar di dunia kerja, sehingga dengan usia tersebut diharapkan mampu menggali atau mengembangkan usaha yang makin baik. Tentu saja, hal tersebut perlu didukung oleh faktor yang lain, termasuk keterampilan serta peluang kerja.

Selain dari perspektif produktivitas sumber daya manusia, peran tanah sebagai salah satu faktor produksi tentu lebih tepat jika difungsikan sebagai media di dalam menghasilkan atau memproduksi sesuatu. Oleh sebab itu, penggunaan tanah yang ada di suatu wilayah, secara tidak langsung dapat merepresentasikan usaha atau kegiatan yang dominan yang ada di wilayah tersebut. Berdasarkan

data yang diperoleh, penggunaan tanah di Desa Krakitan terdiri atas beberapa penggunaan. Penggunaan lahan berupa pertanian menjadi pokok kegiatan utama masyarakat setempat, dengan jenis pertanian lahan kering seluas 140,36 ha. Mayoritas masyarakat Desa Krakitan menggunakan lahan untuk pertanian jenis komoditas jagung. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat beberapa jenis penggunaan tanah di Desa Krakitan beserta luasannya pada Tabel 3.

**Tabel 3** Penggunaan Tanah di Desa Krakitan

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (ha)	Percentase (%)
1	Permukiman	195,67	24,48
2	Pertanian lahan basah	10,96	1,37
3	Pertanian lahan kering	140,36	17,57
4	Kolam/rawa	83,63	10,47
5	Lain-lain	368,49	46,11
	Luas Total	799,11	100,00

Sumber: BPS Klaten, 2020

## B. Potensi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penataan Akses

Penataan tanah yang berkeadilan merupakan salah satu tujuan reforma agraria (Utomo, 2021). Penataan tanah yang adil diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dinilai dengan adanya peningkatan pendapatan dari sektor usaha yang dijadikan sebagai mata pencaharian. Besarnya pendapatan setempat merupakan salah satu faktor dalam menentukan potensi ekonomi wilayah. Upah minimum di kabupaten/kota merupakan salah satu pengukuran atau acuan upah minimal bagi seorang karyawan yang bekerja pada suatu wilayah (kabupaten/kota). Potensi ekonomi Desa Krakitan dalam penelitian ini mengacu pada UMK di Kabupaten Klaten. Perkembangan dari UMK yang ada di Kabupaten Klaten dari tahun 2020 hingga saat ini terus meningkat setiap tahunnya. Adapun UMK yang berlaku di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4** Upah Minimum Kabupaten Klaten

No.	Tahun	Upah Minimum
1	2020	Rp1.947.821,00
2	2021	Rp2.011.515,00
3	2022	Rp2.015.623,00
4	2023	Rp2.152.323,00
5	2024	Rp2.244.012,00

Sumber: BPS Klaten, 2024

UMK ini dapat berfungsi sebagai salah satu pengukuran di dalam pemenuhan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, terkait dengan pengukuran kesejahteraan masyarakat, maka salah satu alat pengukuran yang digunakan adalah UMK ini. Dalam konteks penelitian ini, pengukuran pendapatan seseorang perlu disandingkan dengan besaran UMK yang berlaku di daerah tersebut.

Selain menggunakan pendekatan UMK untuk pengukuran tingkat kesejahteraan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita sebagai bahan analisis. Dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat selalu membelanjakan pendapatan yang telah diperoleh yang tentu saja mempunyai besaran berbeda-beda dan sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, pengukuran pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam wujud pengeluaran secara makro juga diukur berdasarkan pengeluaran per kapita. Adapun perkembangan pengeluaran per kapita di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 5. Dalam kaitannya dengan pengukuran kesejahteraan hidup masyarakat, apabila pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, maka secara umum dapat dikatakan memenuhi tingkat kesejahteraan, dan demikian pula sebaliknya.

**Tabel 5** Perkembangan Pengeluaran Per Kapita di Kabupaten Klaten

No.	Tahun	Pengeluaran Per Kapita
1.	2019	Rp933.193,00
2.	2020	Rp955.532,00
3.	2021	Rp972.999,00
4.	2022	Rp1.074.767,00
5.	2023	Rp1.221.336,00

Sumber: BPS Klaten, 2024

### C. Potensi Usaha Peternakan Sapi di Desa Krakitan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pamong desa di Desa Krakitan, kegiatan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh subjek penanganan akses reforma agraria juga bekerja di bidang usaha peternakan, yaitu peternakan sapi dan peternakan kambing. Perlu ditegaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan peternakan ini adalah beternak, artinya ada beberapa petani yang mempunyai ternak di samping usaha pokoknya sebagai petani atau beternak menjadi alternatif usaha. Namun, berdasarkan informan pelaku usaha ternak tersebut, terdapat perbedaan di dalam orientasi usaha antara ternak sapi dengan ternak kambing. Berdasarkan hasil wawancara, usaha ternak sapi memang lebih diorientasikan untuk diperjualbelikan, mengingat jenis sapi yang banyak dipelihara adalah jenis sapi metal dan jawa lokal yang tentu dilakukan lebih serius dalam perawatannya, dibandingkan dengan usaha ternak kambing. Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa orientasi ternak kambing lebih diarahkan untuk investasi ataupun tabungan manakala pemilik membutuhkan uang guna memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendadak. Oleh karena perbedaan orientasi yang tegas ini maka yang kiranya dapat dihitung produktivitas secara ekonomi hanyalah usaha ternak sapi.

Ternak sapi sudah menjadi kegiatan yang dilakukan masyarakat di Desa Krakitan dengan mayoritas berjenis lokal jawa dan metal. Rata-rata kepemilikan sapi di Desa Krakitan berkisar 3 ekor untuk setiap kepala keluarga. Secara umum, usaha ternak sapi ini dimulai dari pemeliharaan sejak sapi berusia 2 bulan. Menurut beberapa informan yang ditemui di lapangan jika ternak sapi ini akan dikembangkan menjadi usaha, maka perlu penghitungan-penghitungan yang cermat dan matang karena jika tidak mempertimbangkan secara cermat dan matang besaran modal atau input produksi dengan nilai jualnya akan sama. Dengan demikian, maka peternak tidak memperoleh keuntungan, namun malah mengalami kerugian, termasuk kerugian tenaga dan waktu. Oleh sebab

itu, biasanya guna memperoleh keuntungan seorang peternak sapi membeli sapi pada saat sapi baru berusia 2 bulan dan kemudian dirawat selama kurang lebih 10 bulan atau total sapi berusia 1 tahun dan dijual kembali. Dari hasil wawancara terbuka dengan

beberapa peternak sapi serta untuk melihat potensi usaha dari ternak sapi, maka sebagai ilustrasi dapat dilihat besaran modal atau input produksi serta nilai jual sapi pada Tabel 6.

**Tabel 6** Rata-Rata Biaya Variabel Ternak Sapi di Desa Krakitan Tahun 2024 (Tahun Pertama Usaha Ternak Sapi)

Variabel	Jenis Biaya	Nilai Biaya (Rp)
Modal awal	Biaya pembelian sapi (jumlah 3 ekor pada usia 2 bulan)	Rp 30.000.000,00
	Biaya pembuatan kandang	Rp 5.000.000,00
	Biaya peralatan ternak (ember, selang, timba, dan lain-lain)	Rp 1.000.000,00
	Total modal awal	Rp 36.000.000,00
Perawatan	Biaya pakan (suket/rumput, damen/jerami, kalanjana/rumput zajah untuk 3 sapi)	Rp 0,00
	Biaya komboran	Rp 970.000,00
	Biaya vitamin	Rp 10.000,00
	Biaya obat cacing	Rp 87.500,00
	Total biaya perawatan per bulan	Rp 1.067.500,00
Total biaya perawatan untuk 10 bulan		Rp 10.675.000,00

Sumber: Olah Data, 2024

**Tabel 7** Laba/Keuntungan pada Awal Usaha Ternak Sapi di Desa Krakitan Tahun 2024 (Waktu Produksi 10 Bulan)

Variabel Biaya pada Awal Usaha	Biaya Satuan	Jumlah Ternak	Total Biaya
Biaya penjualan	Rp17.500.000,00	3	Rp52.500.000,00
Biaya pembelian	Rp10.000.000,00	3	Rp30.000.000,00
Biaya perawatan (10 bulan)			Rp10.675.000,00
Biaya aset / tetap (kandang dan peralatan)			Rp6.000.000,00
Laba/keuntungan			Rp5.825.000,00

Sumber: Olah Data, 2024

Untuk menghitung keuntungan, maka harus dihitung besaran nilai penjualan dikurangi dengan biaya atau input produksi sesuai pada Tabel 7. Besaran keuntungan sebesar Rp5.825.000,00 tersebut merupakan keuntungan atas penjualan 3 ekor sapi, sehingga jika dihitung berdasarkan satuan, maka besaran keuntungan per ekor adalah sebesar Rp1.942.000,00. Keuntungan tersebut juga merupakan keuntungan selama 10 bulan untuk 3 ekor sapi, sehingga jika total keuntungan dari 3 ekor sapi tersebut dibagi selama 10 bulan, maka besarnya

keuntungan per bulan hanya sebesar Rp582.500,00. Namun, sedikit berbeda halnya jika usaha ternak tersebut telah berjalan lebih dari 1 tahun, karena dalam hal ini peternak sapi tidak lagi mengeluarkan biaya tetap (*fixed cost*), seperti biaya membuat kandang ataupun membeli peralatan peternakan. Jika usaha peternakan yang sudah lebih dari 1 tahun usaha, tentu saja besarnya keuntungan akan lebih besar jika dibandingkan dengan awal usaha. Sebagai ilustrasi penghitungan adalah pada Tabel 8.

**Tabel 8** Laba/Keuntungan pada Usaha Ternak Sapi (> 1 Tahun Usaha) di Desa Krakitan Tahun 2024 (Waktu Produksi 10 Bulan)

Variabel Biaya pada Usaha Lanjutan	Biaya Satuan	Jumlah Ternak (ekor)	Total Biaya
Biaya penjualan	Rp17.500.000,00	3	Rp52.500.000,00
Biaya pembelian	Rp10.000.000,00	3	Rp30.000.000,00
Biaya perawatan (3 bulan)			Rp10.675.000,00
Laba/keuntungan			Rp11.825.000,00

Sumber: Olah data, 2024

Besaran keuntungan sebesar Rp11.825.000,00 tersebut merupakan keuntungan atas penjualan 3 ekor sapi, sehingga jika dihitung berdasarkan satuan maka besaran keuntungan per ekor adalah sebesar Rp3.942.000,00. Keuntungan tersebut juga merupakan keuntungan selama 10 bulan untuk 3 ekor sapi, sehingga jika total keuntungan dari 3 ekor sapi tersebut dibagi selama 10 bulan maka besarnya keuntungan per bulan adalah sebesar Rp1.182.500,00 per bulan. Perbedaan atau selisih keuntungan yang diperoleh pada saat awal usaha ternak sapi maupun usaha pada tahun berjalan ternyata tidaklah berpengaruh signifikan terhadap ukuran kesejahteraan apabila ukuran tersebut disandingkan dengan skala pengukuran standar minimal pendapatan maupun kebutuhan per kapita. Jika menggunakan standar pendapatan minimal atau biasa disebut dengan UMK yang besarnya pada tahun 2024 di Kabupaten Klaten sebesar Rp2.244.012,00, maka keuntungan dari usaha sapi masih berada di bawahnya, yaitu Rp1.182.500,00. Jika menggunakan standar pengukuran pengeluaran minimal per kapita masyarakat dengan asumsi 1 keluarga terdiri atas 4 anggota, maka jika mengacu pada besarnya pengeluaran per kapita masyarakat tahun 2023 adalah sebesar Rp1.221.336,00. Apabila dalam 1 keluarga dengan asumsi 4 orang, maka per keluarga mempunyai pengeluaran sebesar  $Rp1.221.336,00 \times 4 = Rp4.885.344,00$ . Sehingga jika disandingkan antara keuntungan 1 ekor sapi yang hanya sebesar Rp1.182.500,00 per bulan dengan besarnya pemenuhan kebutuhan per keluarga sebesar Rp4.885.344,00, maka terdapat selisih yang cukup besar. Perbandingan besaran atas dasar keuntungan dengan standar pendapatan wilayah (UMK) serta pengeluaran per kapita di atas menunjukkan marjin atau selisih yang cukup besar tersebut dapat dimaknai bahwa usaha ternak sapi ini mempunyai nilai ekonomis yang rendah untuk dikembangkan.

Makna nilai ekonomis jenis usaha peternakan sapi, tidaklah cukup dianalisis berdasarkan fungsi produksi semata. Namun, perlu juga dilakukan analisis pasar ternak sapi yang ada di wilayah tersebut. Jika melihat jenis sapi ternak di Desa Krakitan, yaitu lokal jawa dan metal, maka orientasi pokok secara ekonomis adalah dimanfaatkan dagingnya. Sehingga untuk mengetahui pasar ternak

sapi, harus diketahui terlebih dahulu kebutuhan dan produktivitas daging sapi yang ada di Kabupaten Klaten. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, rata-rata kebutuhan dan produktivitas daging sapi di Kabupaten Klaten adalah sebesar 2.247.439 kg/tahun. Besaran angka dalam satuan kg ini tentu saja tidak dapat secara langsung dikonversikan dalam bentuk jumlah satuan ekor sapi, sehingga perlu dikonversikan salah satu dari satuan dimaksud. Untuk memudahkan penghitungan pasar ternak sapi, maka besaran satuan dalam bentuk kg harus dikonversikan menjadi satuan jumlah ternak. Acuan yang digunakan sebagai dasar konversi berdasarkan standar ukuran yang digunakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Klaten menjelaskan bahwa 1 ekor sapi dengan berat rata-rata atau standar 350 kg menghasilkan daging sapi bersih seberat 122,5 kg bersih. Oleh sebab itu, kebutuhan atau produktivitas sapi adalah 2.247.439 kg dibagi dengan 122,5 kg yaitu 18.347 ekor sapi per tahun. Apabila besaran kebutuhan atau pangsa pasar ternak sapi yang jumlahnya sebanyak 18.347, dengan data jumlah sapi berdasarkan estimasi bulan Mei 2024 berjumlah kurang lebih sebanyak 93.000 ekor di Kabupaten Klaten, maka telah terjadi *over capacity product* sapi sebanyak  $93.000 - 18.347 = 74.653$  ekor sapi. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa jumlah penawaran lebih tinggi dari jumlah permintaan, atau dalam bahasa ekonomi disebut dengan *excess supply*. Hal ini sesuai hukum ekonomi yang mengakibatkan terjadinya penurunan harga menuju keseimbangan. Atas dasar hasil analisis peluang pasar dan jika dikaitkan dengan analisis fungsi produksi, maka sifat atau karakteristiknya cenderung linier atau searah, atau jelasnya pendapatan usaha sapi makin rendah seiring dengan tingginya *supply* dibandingkan dengan rendahnya *demand*.

#### D. Potensi Usaha Pertanian Jagung di Desa Krakitan

Usaha pertanian jagung memang dominan menjadi fokus penataan akses di Desa Krakitan. Hal tersebut tentu karena sebagian besar penerima atau subjek penataan akses yang ada adalah petani jagung. Untuk mengetahui peluang usaha pertanian jagung secara ekonomi, maka harus dilakukan analisis fungsi produksi serta analisis pasar produk tersebut.

Tentu saja, dalam penghitungan secara ekonomi untuk memudahkan pembaca dalam memahami, maka perlu menggunakan asumsi-umsi untuk satuan besaran yang digunakan, yang merupakan hasil turunan dari wawancara dengan pelaku usaha. Untuk lebih jelasnya, penghitungan fungsi produksi secara ekonomis dapat dicermati pada Tabel 9.

**Tabel 9** Komponen Biaya Produksi Pembuatan Pupuk Organik (Dalam Satu Masa Produksi)

Jenis Biaya	Total Biaya
Biaya pendapatan (Produktivitas 375 kg x Rp5.500,00 pada luas area 600 m <sup>2</sup> dengan kebutuhan bibit 1 kg)	Rp. 2.062.500,00
Biaya produksi	
Bibit bisi 16	Rp. 105.000,00
Pupuk	Rp. 81.000,00
Total pendapatan bersih per panen 3 bulan(pendapatan-produksi)	Rp. 1.876.500,00
Total Pendapatan Bersih per Bulan	Rp. 625.500,00

Sumber: Olah data, 2024

Dari hasil penghitungan diketahui bahwa dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan pertanian seluas 600 m<sup>2</sup> untuk usaha pertanian jagung, diperoleh rata-rata pendapatan bersih sebesar Rp625.500 per bulan. Dengan demikian, jika menganalisis dari data yang tersedia di BPS menunjukkan bahwa luas lahan pertanian di Kabupaten Klaten adalah 31.708,4 ha, sedangkan berdasarkan sensus pertanian tahun 2023 menunjukkan jumlah petani di Kabupaten Klaten sebanyak 109.415 jiwa, sehingga diperoleh rata-rata luas penguasaan tanah pertanian di Kabupaten Klaten adalah 31.708,4 ha: 109.415 = 0,29 ha atau jika dikonversikan dalam satuan meter menjadi 2.900 m<sup>2</sup>. Dengan luasan 2.900 m<sup>2</sup>, maka berdasarkan penghitungan asumsi besaran pendapatan di atas menjadi  $Rp625.500 \times 4,83 = Rp3.023.250,00$ /bulan.

Besarnya rata-rata pendapatan petani jagung sebesar Rp3.023.250,00/bulan di Kabupaten Klaten perlu disandingkan dengan standar minimal pengukuran kelayakan hidup di Kabupaten Klaten, yaitu mengacu pada UMK dan pengeluaran per kapita. UMK di Kabupaten Klaten Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.244.012,00, sedangkan pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp1.221.336,00. Hasil dari perbandingan antara pendapatan riil usaha pertanian jagung dengan standar minimal kelayakan hidup menunjukkan jenis usaha jagung mempunyai skala ekonomis yang lebih tinggi. Namun demikian,

peluang usaha pertanian jagung di Kabupaten Klaten perlu dikaji kembali dengan ketersediaan peluang pasar. Analisis pasar usaha pertanian jagung perlu untuk dicermati kembali guna mengetahui telah terjadi *excess demand* ataukah *excess supply*.

Data BPS menunjukkan bahwa produktivitas jagung di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 adalah 86.430 ton, sedangkan kebutuhan atau permintaan rata-rata produksi jagung di Kabupaten Klaten adalah sebesar 10.569 ton, sehingga dapat dikatakan Kabupaten Klaten terjadi surplus produksi jagung sebesar  $86.430 - 10.569 = 75.861$  ton atau telah terjadi *excess supply*. Artinya, jika produksi jagung yang dihasilkan di Kabupaten Klaten tetap akan dipasarkan di lokasi yang sama, maka yang akan terjadi adalah penurunan harga produk. Oleh karena itu, agar kestabilan harga jagung tetap terjaga maka produksi jagung yang dihasilkan di Kabupaten Klaten sebesar 75.861 ton harus dipasarkan atau di-*supply* ke luar daerah/wilayah Kabupaten Klaten.

## E. Potensi Usaha Pupuk Organik

Program penataan akses yang awalnya hanya difokuskan pada usaha pertanian jagung dan ternak sapi kemudian ditindaklanjuti dengan usaha pemanfaatan sisa atau limbah tanaman jagung yang selama ini hanya dimanfaatkan untuk pakan ternak semata. Ide cemerlang tersebut muncul dari penggerak Reforma Agraria di Desa Krakitan dengan memunculkan gagasan baru, yaitu mengoptimalkan limbah atau sisa tanaman jagung untuk mewujudkan produk baru berupa pupuk organik. Ide yang muncul dari penggerak Reforma Agraria, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten diterima dengan baik dan kemudian ditindaklanjuti dengan studi tiru yang dibiayai oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten ke PT Agri Kencana Perkasa di Kecamatan Ceper selaku perusahaan global agribisnis dan agroindustri berbasis penerapan bioteknologi modern dengan salah satu produk utama berupa pupuk organik.

Studi tiru tersebut merupakan kegiatan melihat secara langsung proses pembuatan pakan ternak dan pembuatan pupuk yang inputnya berasal dari tanaman jagung. Manfaat yang diperoleh selain kegiatan kunjungan, penerima program penataan akses mendapatkan informasi secara langsung terkait dengan kegiatan atau proses produksi dengan narasumber di lapangan. Untuk mengaplikasikan

materi yang telah diterima, Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten juga mengundang pendamping institusi lokal yang telah terlebih dahulu berkecimpung dengan produk yang sama, yaitu Komunitas Petani Muda Klaten. Komunitas ini diberikan ruang dan waktu yang cukup sekitar 3 (tiga) bulan untuk mendampingi serta memberikan pelatihan langsung dalam hal proses produksi. Setelah pendampingan dan pelatihan dari Komunitas Petani Muda Klaten, para subjek penerima *access reform* minimal dapat mengoptimalkan limbah atau sisa tanaman jagung, guna pemanfaatan sebagai pakan ternak.

Dalam hal pelatihan dan pendampingan produk baru tersebut, selain memproduksi makanan ternak, juga terdapat pelatihan usaha pembuatan pupuk organik. Namun, pilihan usaha ini relatif masih

banyak yang belum tertarik untuk memanfaatkannya. Hasil wawancara dengan pamong desa yang sekaligus sebagai anggota kelompok tani jagung di Desa Krakitan sebagai penerima manfaat *access reform* menyebutkan bahwa baru ada 2 (dua) petani yang sudah mulai mengembangkan produk usaha pupuk organik secara serius. Hal ini mungkin karena ketidaktahuan mengenai hasil produksi yang kiranya akan diperoleh dari usaha produksi pupuk organik. Berdasarkan data hasil wawancara, perlu kiranya diketahui prospek usaha dari pupuk organik ini dengan menganalisis fungsi produksi dan analisis pasar. Dari data yang diperoleh peneliti, untuk menghitung besaran input produksi, *output* produksi, serta peluang pasar dapat dilihat penghitungan secara ekonomi pada Tabel 10.

**Tabel 10** Komponen Biaya Produksi Pembuatan Pupuk Organik (Input dan Biaya yang Dikeluarkan dalam 1 Kali Proses Produksi)

Jenis Biaya	Komponen Biaya	Nama Kegiatan	Biaya (Rp)
Produksi	Biaya Bahan Baku	Pembelian kotoran ayam	Rp 100.000,00
		Pembelian bahan bakar solar	Rp 20.400,00
		Penyediaan bahan baku: pelepas pisang/enceng gondok/bonggol jagung	Rp 0,00
Non Produksi	Biaya Pemasaran	Pembelian kantong plastik	Rp 200.000,00
Total biaya produksi pupuk			Rp 320.400,00

Sumber: Olah data, 2024

Penetapan harga jual pupuk per karung diukur petani dengan setiap karung pupuk hasil pengolahan mandiri tersebut dijual dengan harga Rp35.000,00. Produksi rata-rata setiap masa satu periode produksi, petani dapat menghasilkan 200 karung pupuk organik. Dengan pendekatan analisis biaya, laba/keuntungan bersih yang dapat diperoleh pada Tabel 11.

**Tabel 11** Biaya Penerimaan Petani dari Hasil Produksi Pupuk di Desa Krakitan (dalam Satu Masa Produksi)

Jenis Biaya	Keterangan	Biaya
Pendapatan	200 karung x @ Rp35.000,00	Rp. 7.000.000,00
pengeluaran produksi		Rp. 320.400,00
Pengeluaran iuran/ kas Penjualan di kelompok tani	200 sak x @ Rp200,00	Rp. 40.000,00
Keuntungan bersih		Rp. 6.639.600,00

Sumber: Olah data, 2024

Selanjutnya, menurut hasil wawancara, dalam sehari jika input produksi tersedia maksimal dapat menghasilkan produk sebanyak 4 kali. Oleh sebab

itu, jika mengacu pada keterangan tersebut, maka dalam sehari besarnya produk pupuk organik tersebut adalah  $Rp6.639.600,00 \times 4$  proses produksi =  $Rp26.558.400$ /hari. Jika menggunakan asumsi bulanan dengan jumlah hari 30, maka produk yang bisa dihasilkan adalah Rp796.752.000,00. Besaran angka yang diperoleh tersebut dapat dikategorikan sebagai nilai yang fantastis. Untuk mengamati apakah usaha ini mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi, maka besaran nilai total produksi tersebut harus dibagi dengan target penerima program penataan akses, yang semula ditargetkan sebanyak 90 peserta. Jumlah Rp796.752.000,00 : 90 target peserta, maka akan diperoleh pendapatan sebesar Rp8.852.800,00/peserta/bulan. Besaran nilai Rp8.852.800,00/peserta/bulan ini ternyata jika disandingkan dengan skala pengukuran pendapatan standar minimal wilayah atau UMK tahun 2024 yang besarnya Rp2.244.012,00, ataupun kebutuhan minimal pengeluaran per kapita tahun 2023 sebesar Rp1.221.336,00, dan bila dikonversikan dalam asumsi 1 keluarga terdiri atas 4 anggota,

maka besarnya pengeluaran per kapita sebesar Rp4.885.344,00 nilainya tetap akan lebih besar pendapatan dari produksi usaha pupuk organik. Artinya, secara ekonomi, produksi pupuk organik mempunyai skala maupun peluang ekonomis yang terbuka dan menguntungkan.

Namun demikian, sifat dari produk yang dihasilkan tetap harus dianalisis peluang pasar yang ada. Untuk mengetahui seberapa besar peluang pasar dari pupuk organik tersebut, maka perlu diketahui besaran atau jumlah permintaan dan penawaran pupuk yang ada di wilayah tersebut. Berdasarkan data dari klaten kab.go.id, subsidi pupuk yang diterima petani di Kabupaten Klaten terdiri dari 2 (dua) jenis pupuk, yaitu urea dan NPK. Untuk pupuk urea, subsidi yang diberikan total dalam 1 (satu) tahun berkisar 25.974 ton dan NPK sejumlah 11.500 ton. Apabila dijumlahkan, maka total subsidi pupuk dari pemerintah di Kabupaten Klaten per tahun berkisar 37.474 ton (Tabel 12). Besaran total subsidi ini harus dihitung ataupun dibagi dengan kebutuhan pupuk sesuai dengan luas lahan pertanian di Kabupaten Klaten. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Klaten, luas areal lahan pertanian di Kabupaten Klaten adalah 31.708,4 ha atau 50% dari luas wilayah. Selanjutnya, berdasarkan data dari Dinas Pertanian, kebutuhan pupuk rata-rata untuk 1 ha tanah pertanian kurang lebih sebesar 500 kg pupuk. Jika luas tanah pertanian seluas 31.708,4 ha, maka dibutuhkan pupuk sebanyak 15.854 ton untuk 1 kali masa panen. Masa panen per tahun rata-rata adalah sebanyak 3 kali, sehingga kebutuhan pupuk total dalam 1 tahun di Kabupaten Klaten adalah sebanyak 47.562 ton (Tabel 13).

**Tabel 12** Kebutuhan dan Subsidi Pupuk Organik dalam 1 Masa Produksi

Jenis Kegiatan	Jumlah	Keterangan
Kebutuhan pupuk 1x produksi Pada luas lahan 31.708,4 ha	15.854,2 ton	1 ha membutuhkan 500 kg pupuk
Pupuk subsidi pemerintah	37.474 ton	Jenis urea dan NPK

Sumber: Olah data, 2024

Peluang pasar untuk produksi pupuk organik dalam masa satu tahun (3 kali masa produksi) di Kabupaten Klaten yang ada pada Tabel 13.

**Tabel 13** Kebutuhan Peluang Pasar Produksi Pupuk Organik di Kabupaten Klaten

Jenis Biaya	Keterangan	Jumlah
Kebutuhan pupuk dalam 1 tahun (3x produksi)	15.854,2 ton x 3	47.562,6 ton
Subsidi pemerintah 1 tahun		37.474 ton
Peluang pasar karena adanya excess demand (kekurangan pupuk atau peluang pasar dari sisi produsen)		10.088,6 ton

Sumber: Olah data, 2024

Besaran jumlah kebutuhan riil sebesar 47.562 ton tersebut tidak sebanding dengan subsidi pupuk yang diberikan pemerintah, yaitu total 37.474 ton per tahun. Dengan kata lain, terdapat defisit kebutuhan pupuk sebesar  $47.562 - 37.474 = 10.088$  ton yang harus ditanggung oleh petani itu sendiri. Dengan demikian, maka untuk mengukur besarnya peluang pasar pupuk di Kabupaten Klaten, besaran defisit pupuk harus dibagi dengan kebutuhan riil pupuk, atau  $10.088 : 47.562 = 0,21$  atau sebesar kurang lebih 21%. Hasil ini berbeda bahkan bertolak belakang dengan potensi usaha jagung maupun ternak sapi, di mana potensi usaha tersebut mengalami *excess supply*, sedangkan untuk usaha pupuk ini mengalami *excess demand*. Dalam bahasa yang lebih sederhana, masih ada peluang pasar sebesar 21% dari total kebutuhan pupuk di Kabupaten Klaten per tahun.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis fungsi produksi dan analisis pasar menunjukkan bahwa secara ekonomi hierarki peluang dan potensi usaha dari yang tertinggi menuju terendah adalah usaha pupuk organik, usaha pertanian jagung, dan terakhir usaha ternak sapi. Dengan demikian, maka jenis usaha yang sebenarnya paling berpeluang ataupun berpotensi untuk dikembangkan adalah usaha produksi pupuk organik. Oleh karena itu, yang perlu menjadi perhatian adalah input utama produk pupuk organik yang berasal dari sisa-sisa tanaman jagung perlu dijaga dan terus dioptimalkan fungsinya serta meminimalisir residu. Apalagi ketika prospek usaha pertanian jagung hasilnya kurang menjanjikan

secara ekonomi, maka perlu merubah fungsi tanaman jagung tidak hanya menghasilkan produk jagung semata, namun juga mengoptimalkan sisa tanaman jagung guna dimanfaatkan sebagai bahan baku utama produksi pupuk organik. Selain itu, mengacu pada potensi usaha pupuk organik yang secara ekonomi mempunyai peluang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah harus menindaklanjuti dengan memproteksi jenis pupuk organik tersebut sesuai hak kekayaan intelektual sehingga produk tidak diduplikasi oleh produsen yang lain. Kiranya yang tidak kalah penting juga bagi pemerintah adalah peran nyata dalam membantu peningkatan usaha maupun kualitas produk melalui pelatihan, pendampingan usaha, serta pemasaran yang lebih luas jangkauannya. Dalam hal ini, pemerintah dapat merangsang pengusaha ataupun perusahaan guna mem-backup atau membantu terkait pembiayaan dengan metode *corporate social responsibility (CSR)*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Informasi Geospasial. (2024). Peta RBI.
- BPS Klaten. (2020). Kecamatan Bayat Dalam Angka 2020.
- BPS Klaten. (2024). Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Bramantyo Djohanputro. (2008). Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro. PPM.
- Erni Mohamad, Julhim S Tangio, & Kunusa, W. R. (2014). Pemanfaatan Limbah Jagung Sebagai Pupuk Organik Untuk Peningkatan Produksi Pertanian Desa Talumopatu Di Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. 86, 1–13.
- Gafuruningtyas, D., Setiatin, N., & ... (2024). Dampak Redistribusi Tanah Terhadap Penghidupan Masyarakat di Kawasan Fora 2 (Ternate) Maluku Utara. Majalah Geografi.
- Husnan, S., & Muhammad, S. (2020). Study Kelayakan Proyek Bisnis. UPP STIM YKPN.
- Mudrajat Kuncoro. (2013). Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi. UPP STIM YKPN.
- Sudaryono, D. (2017). Studi Kelayakan Bisnis: Teori, Analisis, dan Teknik Penyusunan Proposal. Lentera Ilmu Cendekia.
- Sudibyanung, S., Prasetyo, P. K., & Rahmadi, A. (2023). Peluang Penataan Akses Berdasarkan Potensi Wilayah:(Studi Kasus Di Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo). Jurnal Pertanahan. <https://jurnalpertanahan.id/index.php/jp/article/view/208>
- Supinah. (2022). Penyusunan Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Desa Dan Analisis Ekonominya Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Utomo, S. (2021). Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 4 Nomor 2(2).